

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017 (studi kasus kelurahan Tarok Dipo) dapat disimpulkan :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bukittinggi dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan kehadiran dalam pertemuan berada pada level tokenisme, yaitu tangga kelima, plakasi. Dimana komunikasi dua arah sudah dibuka, tapi pada akhirnya wewenang dalam menilai kelayakan terhadap masukan masyarakat tetap berada ditangan pemerintah.
 - b. Pada tahapan keaktifan dalam mengemukakan saran dan usul, partisipasi masyarakat berada pada level tokenisme pada tangga keempat, yaitu konsultasi. Yang berarti masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan, tanpa adanya jaminan umpan balik yang diberikan masyarakat akan memberikan perubahan terhadap keputusan yang akan diambil nantinya.
 - c. Pada tahapan keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, berada pada level tokenisme yaitu tangga keempat, konsultasi. Dimana walaupun komunikasi dua arah sudah dibuka, tidak ada jaminan masukan dari masyarakat akan mempengaruhi hasil akhir.
 - d. Pada variabel keterlibatan dalam memberi persetujuan terhadap rancangan rencana, berada pada level tokenisme yaitu tangga ketiga, informasi. Pada tahapan ini walaupun masyarakat sudah diikuti sertakan tapi komunikasi yang terjadi masih satu arah, dimana pemerintah berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Analisis Partisipasi Masyarakat Kota Bukittinggi dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017 (studi kasus Kelurahan Tarok Dipo)
 - a. Sedikitnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW ini, terutama dalam hal perubahan fungsi lahan yang terjadi di kawasan Tambuo.
 - b. Dapat dilihat bahwa partisipasi dikawasan Tarok Dipo juga masih berada di level tokenisme, dimana pemerintah telah hadir dengan draft rencana yang sudah dibuka kepada masyarakat, tapi sayangnya umpan balik masyarakat tidak mempengaruhi hasil akhir dari perencanaan.
 - c. Kebijakan perubahan fungsi lahan ini menyakiti masyarakat, karena akan berdampak kepada pelaku usaha yang ada di pusat perdagangan Aur Kuning.
3. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
 - a. Dari hasil regresi logistik dapat dilihat bahwa jenis kelamin, usia dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017.
 - b. Masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki memiliki peluang lebih besar dalam berpartisipasi dibanding dengan wanita.
 - c. Masyarakat dengan usia diatas 50 tahun memiliki peluang lebih besar dalam berpartisipasi dibandingkan dengan masyarakat berusia dibawah 50 tahun.
 - d. Masyarakat yang memiliki pendapatan diatas UMK kota Bukittinggi memiliki peluang lebih besar dalam berpartisipasi dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai pendapatan dibawah UMK.

B. Saran

Dari uraian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW, agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, maka disarankan :

1. Agar lebih ditingkatkan pemanfaatan media cetak dan elektronik, seperti penggunaan web kota Bukittinggi, atau pun media sosial lainnya. Begitu juga dengan baliho khusus mengenai tata ruang Bukittinggi yang selama ini masih

terlihat kosong, dapat digunakan sebagai alat untuk menyebar informasi. Selain itu, sejalan dengan adanya gerakan kembali ke surau, dimana surau dijadikan basis bagi berbagai kegiatan, maka pengumuman penyusunan tata ruang pun bisa dilakukan di surau-surau atau pun mushalla-mushalla, selain di kantor kelurahan dan kantor-kantor RW dan RT.

2. Perlu lebih diperhatikan keterwakilan dari masyarakat kedepannya, agar semua unsur masyarakat dapat terwakili dalam semua forum. Dan yang perlu ditanamkan agar partisipasi yang terjadi merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, sebagai bentuk keasadaran akan pentingnya partisipasi, bukan hanya memenuhi undangan pemerintah.
3. Setiap kelurahan agar membentuk suatu panitia khusus yang menerima semua usulan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, dimana usulan ini yang akan dibawa oleh tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari masing-masing kelurahan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam proses penyusunan rencana tata ruang ini.
4. Partisipasi masyarakat juga bisa didorong dengan peningkatan kegiatan pelatihan, pendidikan dan sosialisasi. Sangat diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pengetahuan masyarakat dan keseluruhan stakeholder dalam perencanaan. Hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang nantinya.
5. Usulan-usulan dan saran dari masyarakat seharusnya dapat menjadi masukan yang bisa meningkatkan kualitas perencanaan. Dengan ditanggapinya dan diperhatikannya masukan-masukan mereka, maka merupakan suatu dorongan dan motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi kedepannya.